



**LAPORAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

2022

KATA PENGANTAR



Sebagai unit kerja pendukung, Biro Hukum dan Kepegawaian berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian. Kontrak kerja yang dibuat awal tahun atas layanan Biro Hukum dan Kepegawaian menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja.

Tingkat kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang mencapai nilai rata-rata diatas 90% menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan mencerminkan pengakuan atas pelayanan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan, Biro Hukum dan Kepegawaian terus melakukan inovasi teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi, antara lain: Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Daily Evaluation System (DES).

Seiring dengan meningkatnya pelayanan, Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id), penghargaan dari BKN kategori 5 komitmen pengawasan dan pengendalian.

Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas

pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Saya berharap keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022 ini memotivasi seluruh komponen Biro Hukum dan Kepegawaian agar bekerja dengan lebih baik. Transformasi untuk menjadi unit kerja terdepan dalam melaksanakan reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan. Untuk itu seluruh insan Biro Hukum dan Kepegawaian harus mengambil peran dalam menumbuhkan berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan untuk menyongsong tantangan ke depan dan bagi perbaikan Biro Hukum dan Kepegawaian.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,



Noer Isrodin Muchlisin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1. Tugas Pokok Dan Fungsi	10
2. Aspek Strategis	11
3. Struktur Organisasi.....	13
4. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
1. Renstra Biro Hukum Dan Kepegawaian 2020-2024.....	16
A. Visi	16
B. Misi.....	17
C. Tujuan	18
2. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Dan Kepegawaian Tahun 2022	22
3. Laporan Kinerja Biro Hukum Dan Kepegawaian.....	23
4. Realisasi Anggaran.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
1. Capaian Kinerja	28
2. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024	32
3. Penghargaan Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2022	33
BAB V PENUTUP	37
1. Kesimpulan.....	37
2. Saran.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peran Biro Hukum dan Kepegaw.....	12
Gambar 2 Struktur organisasi Biro Hukum dan Kepegawaian	13
Gambar 3 Rincian pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian	14
Gambar 4 Mind Mapping Laporan Kinerja Bagian Hukum	24
Gambar 5 Mind Mapping Laporan Kinerja	25
Gambar 6 Mind Mapping Laporan Kinerja	26
Gambar 7 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kepegawaian	27
Gambar 8 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	29
Gambar 8 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	29
Gambar 9 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	30
Gambar 9 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	30
Gambar 10 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	31
Gambar 10 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	31
Gambar 11 Penghargaan BKN Award.....	33
Gambar 11 Penghargaan BKN Award.....	33
Gambar 12 Penghargaan BKN Award.....	33
Gambar 12 Penghargaan BKN Award.....	33
Gambar 13 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 13 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 14 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 14 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 15 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 15 Penghargaan BKN Award.....	34
Gambar 16 Penghargaan BKN Award.....	35
Gambar 16 Penghargaan BKN Award.....	35
Gambar 17 Penghargaan BKN Award.....	35
Gambar 17 Penghargaan BKN Award.....	35
Gambar 18 Penghargaan Pengisian Jabatan	36
Gambar 18 Penghargaan Pengisian Jabatan	36
Gambar 19 Penghargaan Pelaksanaan Sistem Merit	36
Gambar 19 Penghargaan Pelaksanaan Sistem Merit	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian.....	13
Tabel 2 Target Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	21
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian.....	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Layanan Biro Hukum dan Kepegawaian meliputi 3 (tiga) bidang pelayanan yaitu hukum, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian. Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian secara garis besar menggambarkan informasi rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Rencana kerja tahun 2022 dan penetapan kinerja tahun 2022 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi kegiatan Biro Hukum dan Kepegawaian serta diintikan dalam Indikator Kinerja.

SASARAN:

- 1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;**
- 2. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien; dan**
- 3. Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai;**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran Biro Hukum dan Kepegawaian diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

1. Sasaran terwujudnya produk hukum yang berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:
 - a) Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan, dengan capaian 80,00%;

- b) Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum, dengan capaian 80%.
2. Sasaran Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a) Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur, dengan capaian indeks 2,88;
 - b) Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan, dengan capaian 58%;
 - c) Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi, dengan capaian indeks 3,23.
3. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:
 - a) Indeks system merit, dengan capaian indeks 0,67;
 - b) Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian, dengan capaian 96,33%;

Dalam upaya peningkatan layanan, Biro Hukum dan Kepegawaian terus melakukan inovasi teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi, antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan media untuk perekaman data dan informasi pegawai dalam mempercepat pemutakhiran data pegawai.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang merupakan media publikasi semua produk hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Daily Evaluation System (DES) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan aplikasi pelaporan kegiatan harian, mingguan, bulanan atau tahunan pegawai.

3. Aplikasi Tunjangan Kinerja merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu membayarkan tunjangan pegawai berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai.
4. Aplikasi e-Prilaku 360° terintegrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah aplikasi untuk Menilai dan Mengukur Perilaku yang dinilai oleh Atasan, Teman/Peer dan Bawahan (360 Derajat) dengan menggunakan survei tertutup sehingga lebih objektif

Dari sisi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, pelayanan di lingkungan Biro Hukum dan Kepegawaian dilakukan secara efisien, kondisi ini terlihat dari capaian nilai dengan penggunaan anggaran sebesar 98,47% Penjelasan secara rinci disajikan pada Bab III pada laporan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

Biro Hukum dan Kepegawaian yang merupakan unit kerja Eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai peran sebagai koordinator, penggerak dan pemberdaya/fasilitator dalam penugasan pengelolaan bidang hukum, kelembagaan dan sumber daya manusia. Karenanya kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang prima tentu sangat dibutuhkan guna mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

“Terwujudnya pelayanan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang prima guna mendukung visi dan misi organisasi”

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diatur bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan unit kerja eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi internal.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, dan pemberian advokasi hukum;

- b. penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi internal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

2. Aspek Strategis

Peran strategis yang diemban oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi organisasi, adalah:

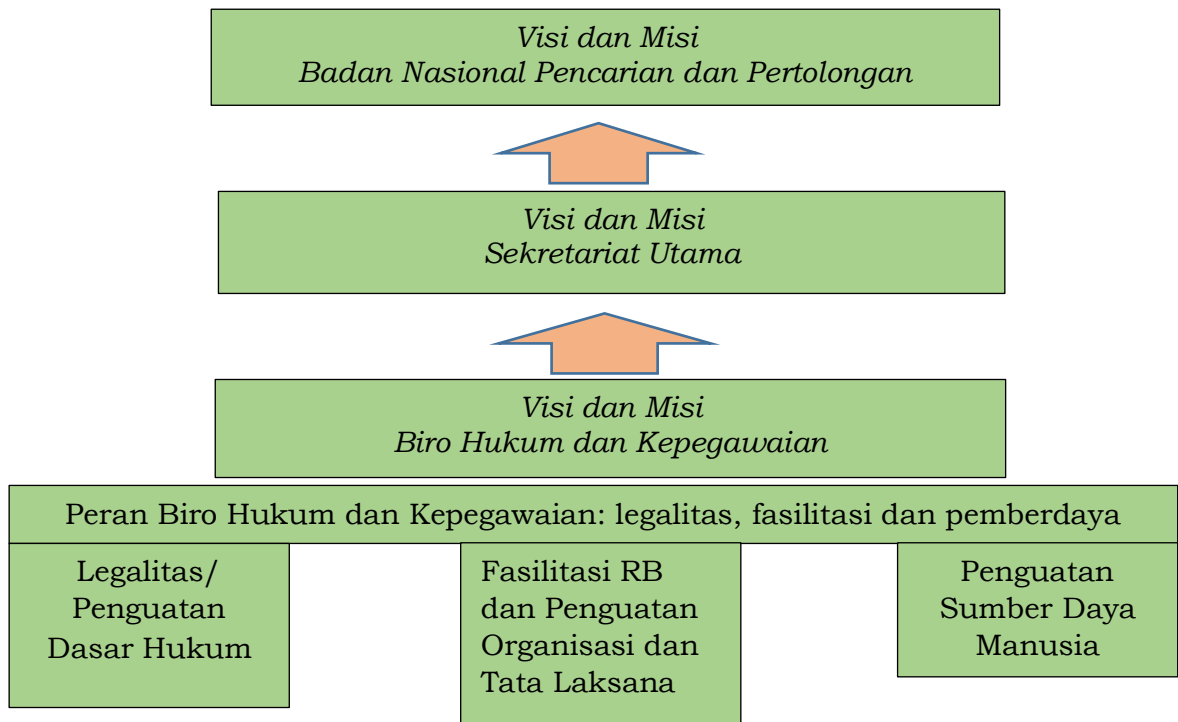
1. Penguatan dasar hukum, sistem pengendalian peraturan perundang-undangan, penguatan advokasi dalam melaksanakan visi dan misi organisasi;
2. Penataan dan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan baik terhadap dimensi struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan indeks reformasi birokrasi.
3. Penataan dan penguatan aspek sumber daya manusia untuk peningkatan kapabilitas menuju sumber daya manusia yang profesional, sinergi dan militan.

Disamping aspek strategis, Biro Hukum dan Kepegawaian juga dituntut untuk memberikan pelayanan optimal/prima kepada unit-unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Layanan prima tersebut bisa dikatakan layanan yang tepat waktu, tepat kualitas, efektif dan berorientasi kepada pengguna.

Peran Biro Hukum dan Kepegawaian dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1

Peran Biro Hukum dan Kepegawaian

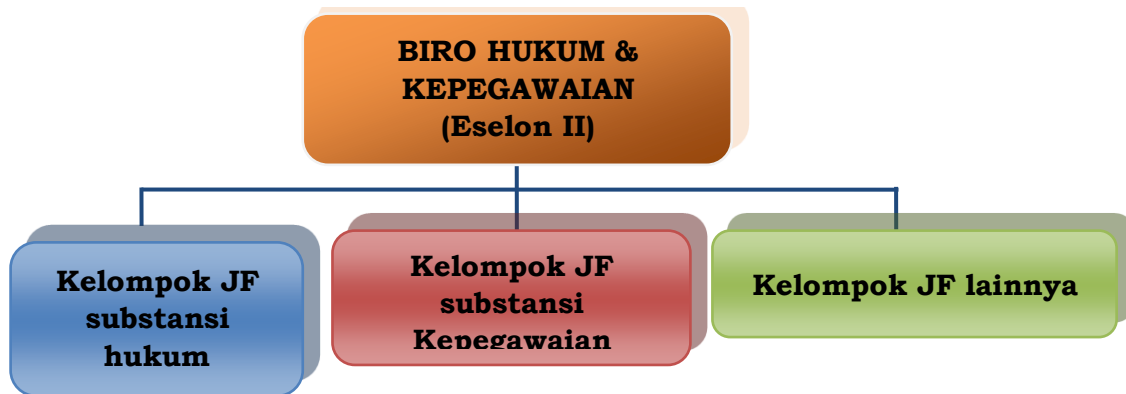


3. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Kepegawaian didukung oleh 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Kelompok JF substansi hukum
2. Kelompok JF substansi Kepegawaian
3. Kelompok JF lainnya pendukung tugas pokok

Gambar 2 struktur organisasi Biro Hukum dan Kepegawaian tampak pada gambar



Sumber daya manusia di lingkungan Biro Hukum dan Kepegawaian tahun 2022, meliputi:

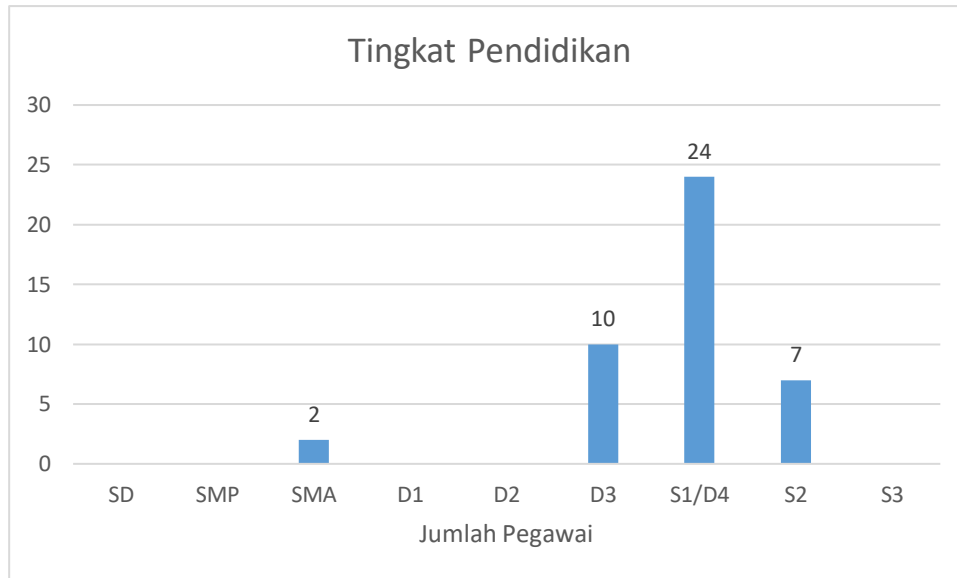
1. Berdasarkan jenis jabatan struktural dan fungsional

Tabel 1 Rincian Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jumlah
E.II.a	1
JFU	5
JFT Perancang Peraturan	1
JFT Analis Hukum	6
JFT Analis Kepegawaian	23
JFT Arsiparis	7
Jumlah	43

2. Berdasarkan tingkat pendidikan

Gambar 3 Rincian pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan



4. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target/rencana kinerja tahun 2022. Secara umum, sistematika penyajian laporan kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilihat pada gambar berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai unit eselon II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Hukum dan Kepegawaian menjabarkan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 kedalam Renstra Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024. Renstra dimaksud dilengkapi dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja mengacu pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.

1. Renstra Biro Hukum Dan Kepegawaian 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Hukum dan Kepegawaian merupakan Unit Eselon II dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi internal.

Mempertimbangkan tugas tersebut, Biro Hukum dan Kepegawaian menjabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Visi Biro Hukum Dan Kepegawaian Tahun 2020-2024

Visi Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024



Mewujudkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah NKRI

“Terwujudnya pelayanan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang prima guna mendukung visi dan misi organisasi”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai unit pendukung dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan senantiasa mempersiapkan segala aspek legalitas, penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia yang professional, sinergi dan militan”

B. Misi Biro Hukum Dan Kepegawaian 2020-2024

Sedangkan Misi Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024 merupakan penjabaran dari misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

- *Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan*
- *Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya*

Adapun misi Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024 adalah sebagai berikut:


- 1) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyelenggarakan bantuan hukum dan pelayanan, dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta peningkatan kinerja kelembagaan;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, evaluasi dan monitoring ketatalaksanaan; dan
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang kepegawaian

C. Tujuan Dan Sasaran Biro Hukum Dan Kepegawaian 2020-2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Hukum dan Kepegawaian seperti yang tersebut diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

- *Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan*
- *Peningkatan standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional*

Tujuan Biro Hukum dan Kepegawaian yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 adalah:



“terwujudnya landasan hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia”

Tujuan tersebut dilengkapi dengan indikator tujuan yang diukur pada akhir tahun Biro Hukum dan Kepegawaian 2022, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;
- 2) Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien;
- 3) Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai.

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah digariskan, Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan dari sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. *Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen;*
2. *Meningkatnya Kekuatan Landasan Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;*
3. *Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia*



1. *Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;*
2. *Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien;*
3. *Meningkatnya kualitas dan kinerja*

Sasaran strategis tersebut diatas dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode rencana strategis 2020 sampai dengan 2024 dengan target tahunan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2 Target Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.7 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1 indeks sistem merit	indeks	-	0,7	0,7	0,8	0,8
	IKSK.7.2 Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	%	-	80	80	90	90
SK.10 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK.10.1 persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	%	-	80	80	90	90
	IKSK.10.2 persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	indeks	-	4	4	5	5
SK.12 Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien	IKSK.12.1 indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur	indeks	-	3	3	4	4
	IKSK.12.2 Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	%	-	60	60	65	65
	IKSK.12.3 indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	indeks	-	3	3	4	4

2. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Dan Kepegawaian Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi diwajibkan untuk menyusun perjanjian kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam perjanjian kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	80% 80%
2	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	3 60% 3
3	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	Indeks sistem merit Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	0,7 80%

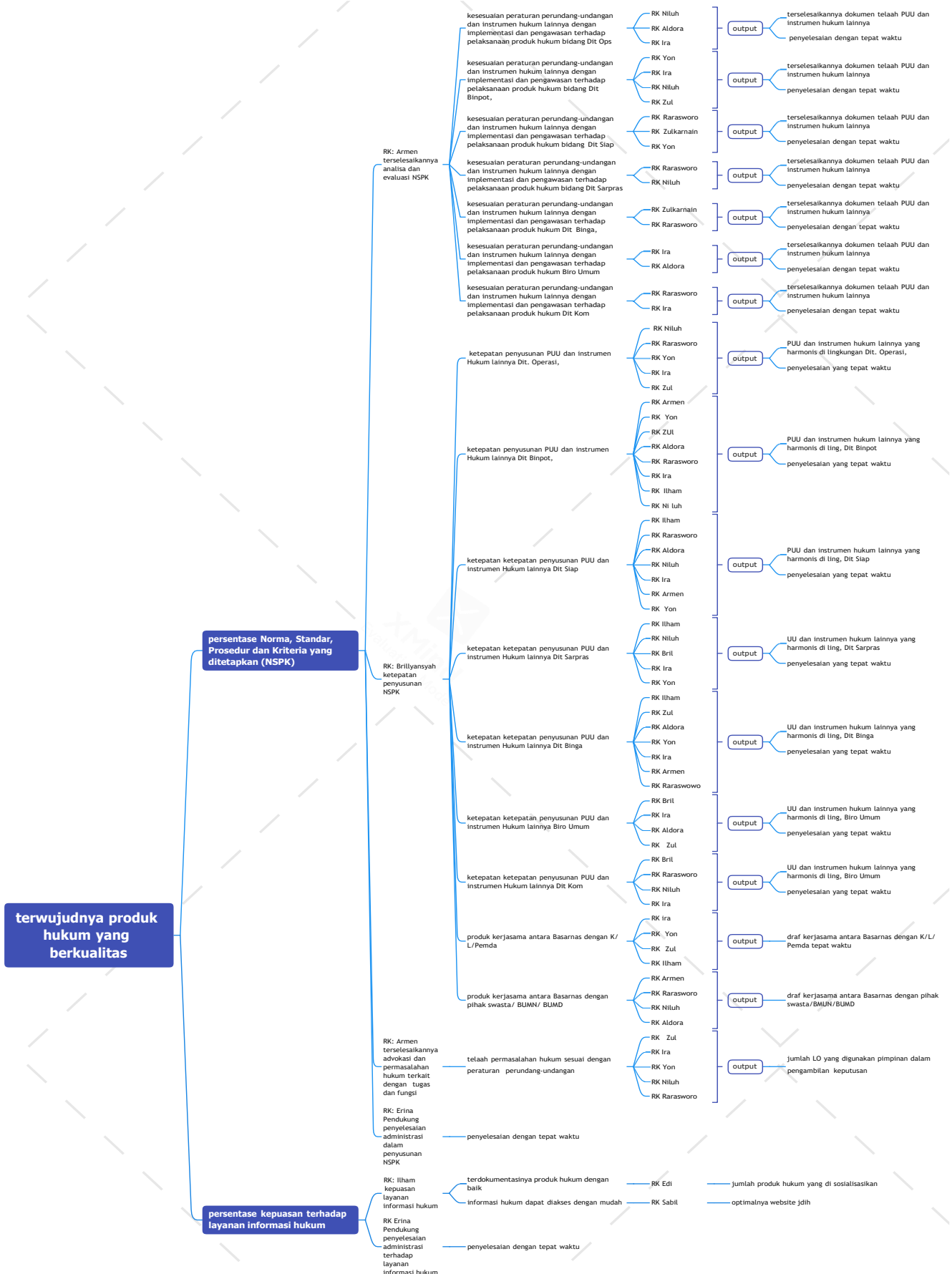
Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung Realisasi setiap indikator dari sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk setiap masing-masing indikator sasaran strategis dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{100} \times \text{target}$$

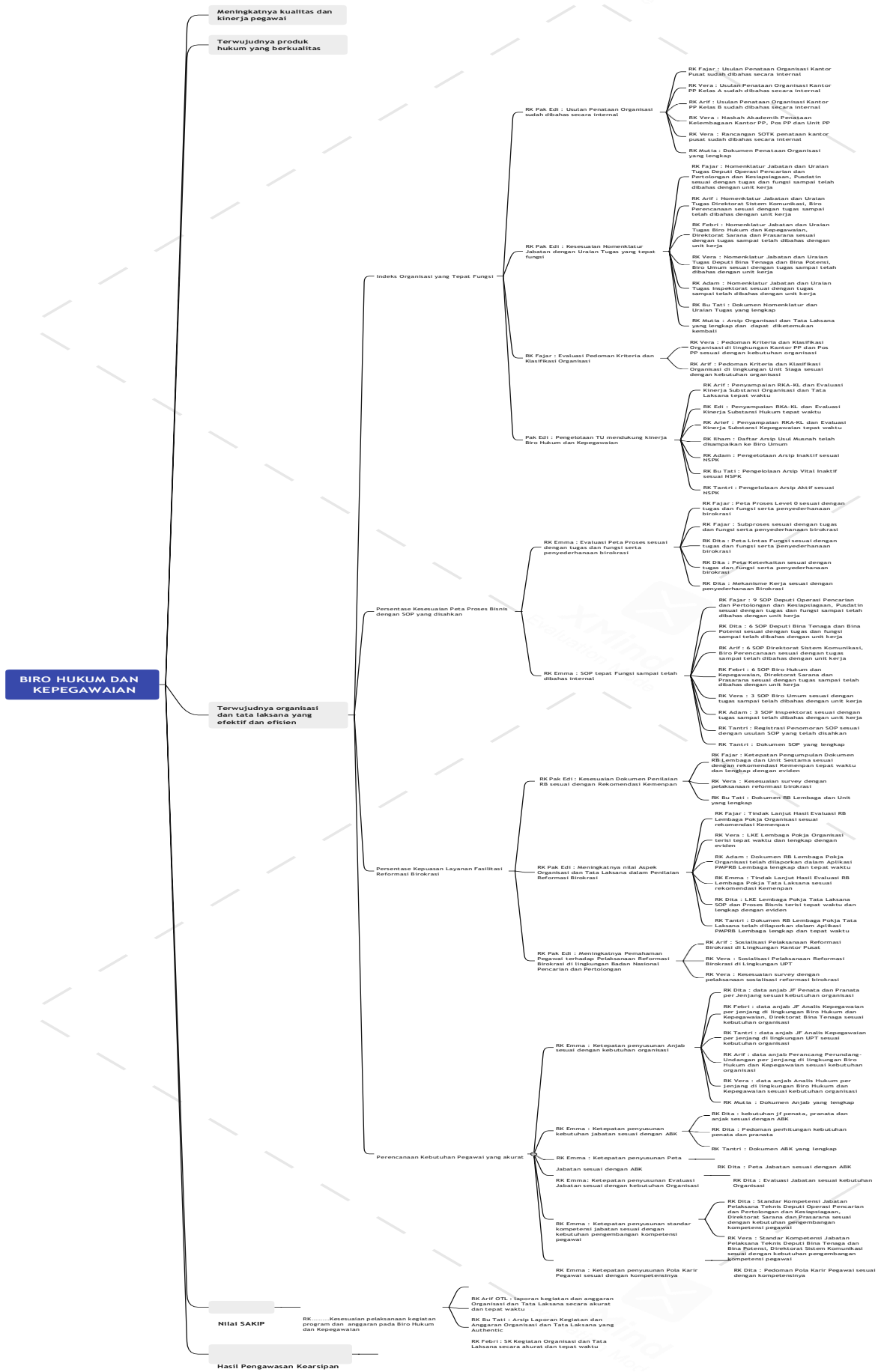
3. Laporan Kinerja Biro Hukum Dan Kepegawaian

Laporan kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

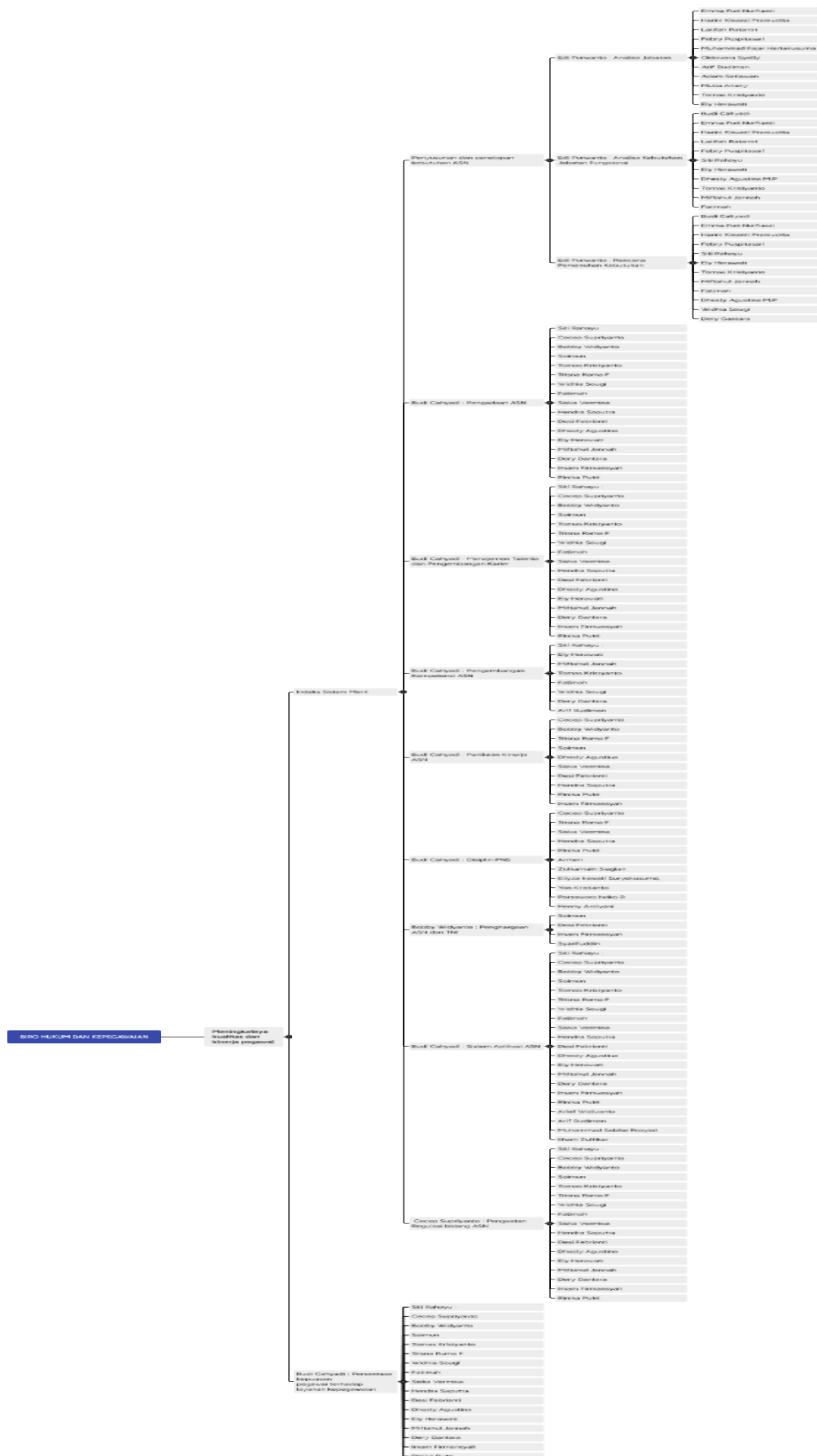
Gambar 4 Mind Mapping Laporan Kinerja Bagian Hukum



Gambar 5 Mind Mapping Laporan Kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Gambar 6 Mind Mapping Laporan Kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana



4. Realisasi Anggaran

Berikut merupakan anggaran Biro Hukum dan Kepegawaian sebelum dan sesudah Automatic Adjustmen beserta realisasinya.

Gambar 7 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kepegawaian

BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 2022						
KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	BLOKIR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	Persentase (%)	SISA ANGGARAN
HUKUM	Rp. 2.442.000.000	Rp. 1.378.239.000	Rp. 1.063.761.000	Rp. 1.061.059.867	99,75	Rp. 2.701.133
ORGANISASI DAN TATALAKSANA	Rp. 1.938.160.000	Rp. 1.058.699.000	Rp. 879.461.000	Rp. 879.287.010	99,98	Rp. 173.990
KEPEGAWAIAN	Rp. 7.700.026.000	Rp. 3.857.862.000	Rp. 3.842.164.000	Rp. 3.756.617.456	97,77	Rp. 85.546.544
TOTAL	Rp. 12.080.186.000	Rp. 6.294.800.000	Rp. 5.785.386.000	Rp. 5.696.964.333	98,47	Rp. 88.421.667

BAB III

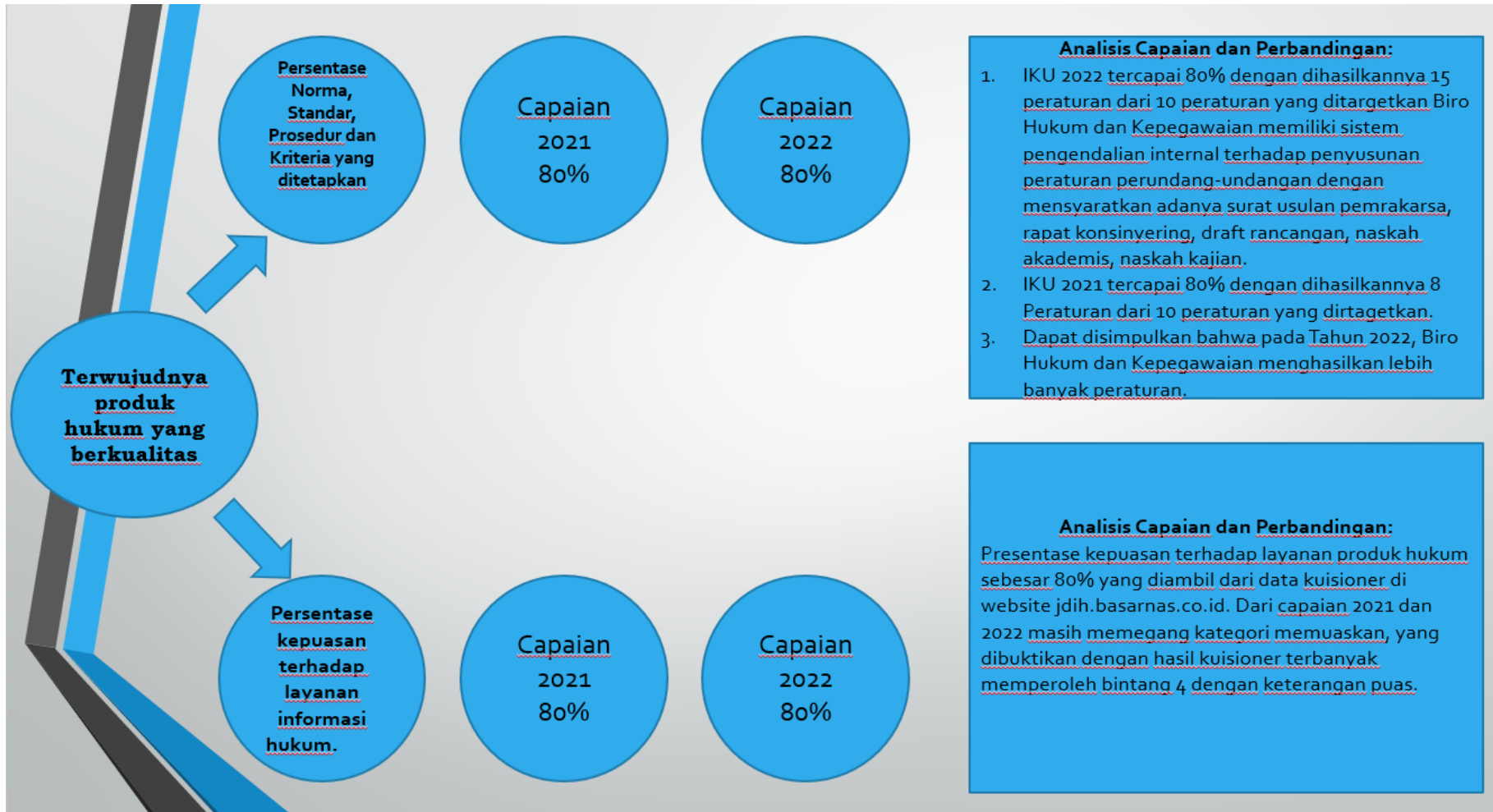
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024. Laporan kinerja tahun 2022 ini merupakan evaluasi kegiatan yang berjalan pada tahun 2022 dan merupakan evaluasi awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Kinerja tahun 2022 akan dijadikan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian terhadap target kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian tahun 2022.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target indikator yang telah diperjanjikan dengan realisasinya. Analisis dilakukan terhadap semua target indikator agar diketahui seberapa besar kinerja tersebut tercapai. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap kinerja yang belum mencapai target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi tahun berikutnya. Analisis capaian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

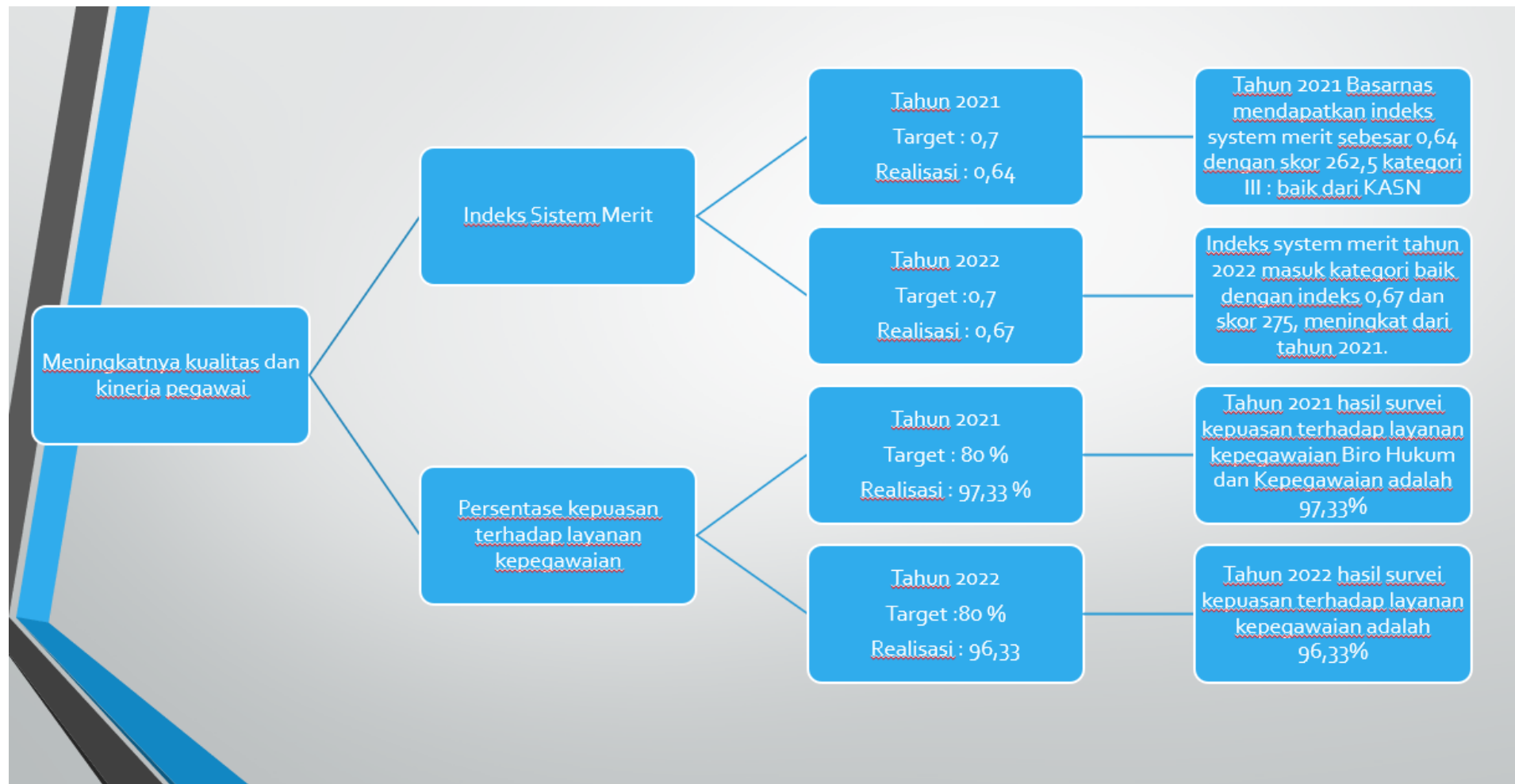
Gambar 8 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian Bagian Hukum



Gambar 10 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Gambar 12 Capaian Kerja Biro Hukum dan Kepegawaian Bagian Kepegawaian



2. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Pencapaian realisasi masing-masing indikator kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian pada awal periode Renstra 2020-2024 merupakan bahan awal sebagai referensi dalam penentuan realisasi untuk tahun selanjutnya.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator kegiatan dapat mencapai target dibandingkan dengan target anggaran, akan tetapi kekurangan target hanya pada indikator pelaksanaan PMPRB, belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan usulan yang diajukan masih dalam proses analisa di KemenPANRB.

Untuk lebih meningkatkan lagi efisiensi anggaran dengan capaian kinerja, Biro Hukum dan Kepegawaian akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun *Plan Of Action (PoA)* pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
2. Melakukan monitoring berkala secara tepat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai perjanjian kinerja.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis *output* dan *outcome*.

3. Penghargaan Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2022

Gambar 14 Penghargaan BKN Award



Gambar 16 Penghargaan BKN Award



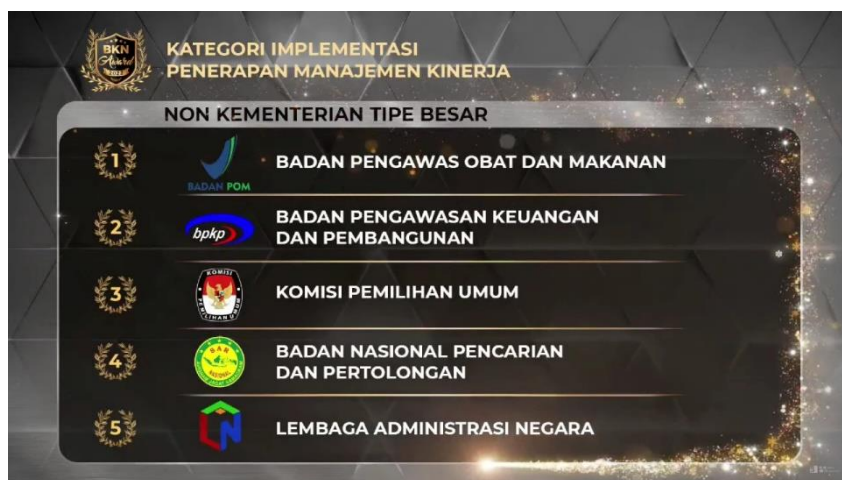
Gambar 18 Penghargaan BKN Award



Gambar 20 Penghargaan BKN Award



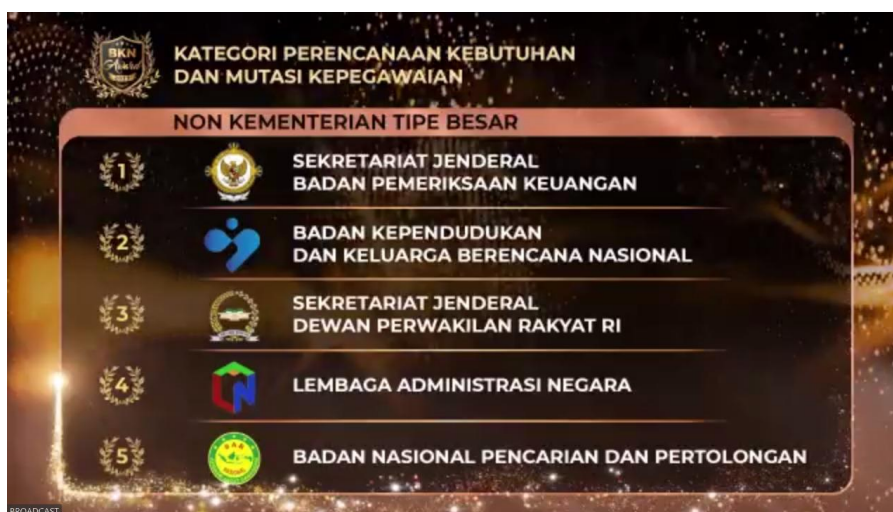
Gambar 22 Penghargaan BKN Award



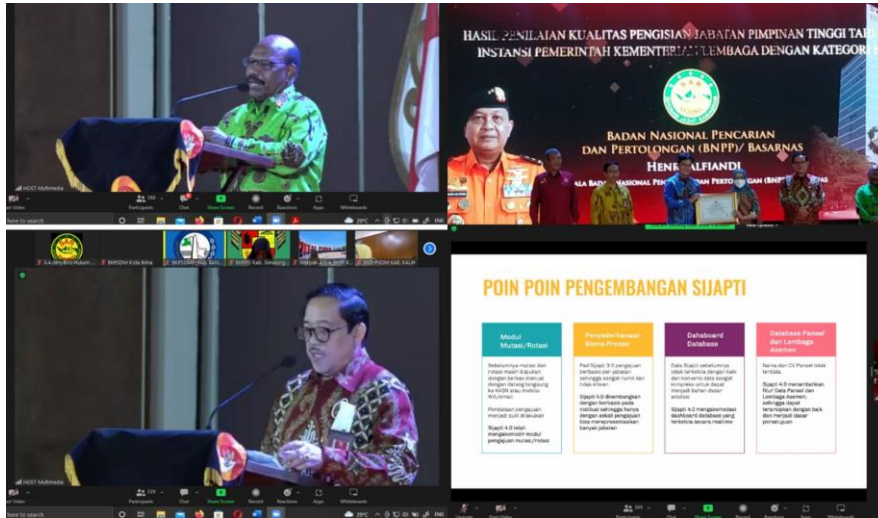
Gambar 26 Penghargaan BKN Award



Gambar 24 Penghargaan BKN Award



Gambar 28 Penghargaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi



Gambar 30 Penghargaan Pelaksanaan Sistem Merit



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan. Capaian sasaran strategis pada tahun 2022 antara lain:

1. Sasaran kegiatan pertama, terwujudnya produk hukum yang berkualitas dicapai dengan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Sasaran kegiatan kedua, Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien dicapai dengan Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur sebesar 2, dengan kesimpulan telah ditetapkannya Road Map RB Basarnas 2020-2024 yang mencakup *Quick Wins* (Perban 1 Tahun 2021) dan telah dilakukan survei efektifitas organisasi Kantor Pusat serta telah melakukan proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN dan RB.
3. Sasaran kegiatan ketiga, Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai dicapai dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri sebanyak 350 (tiga ratus Sembilan puluh satu) formasi, pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pegawai dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan, dan persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian yang mencapai 79,75%.
4. Biro Hukum dan Kepegawaian telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka memperbaiki kinerja unit organisasi. Beberapa tindakan korektif yang diambil diantaranya: Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan media untuk perekaman data dan informasi pegawai dalam mempercepat pemutakhiran data pegawai, Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang merupakan media publikasi semua produk hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

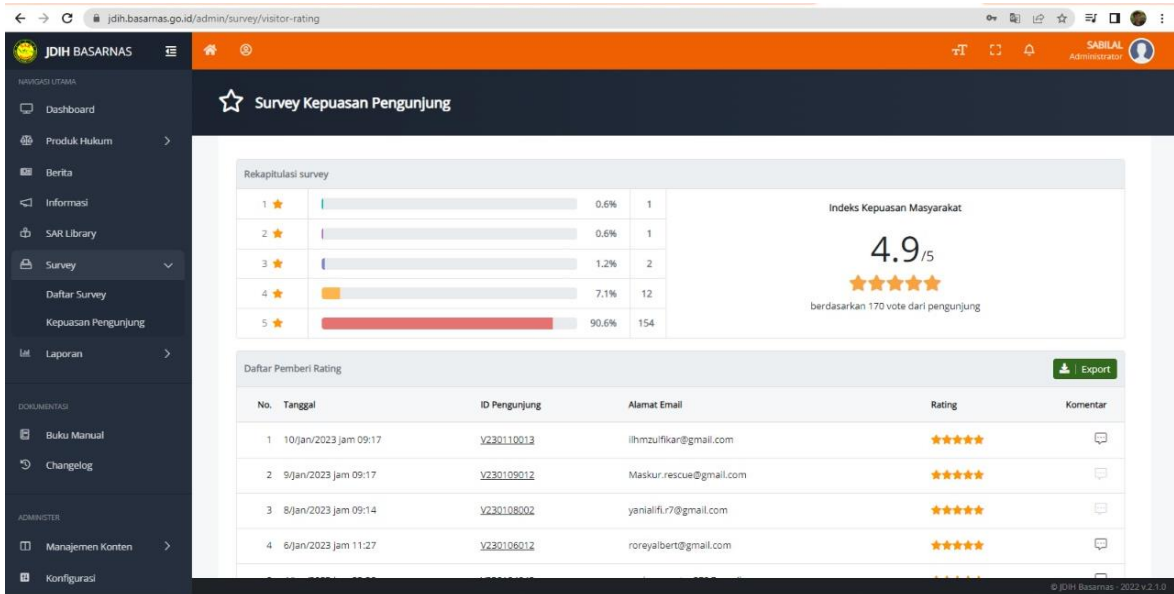
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *stakeholder*.

2. Saran

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja tahun 2022, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas fungsi Biro Hukum dan Kepegawaian, antara lain adalah:

1. Langkah dalam mempertahankan capaian dengan melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap harmonisasi internal penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala atas PMPRB diseluruh unit kerja.
3. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pegawai yang telah melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai.
4. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2022 dapat memenuhi Akuntabilitas kami terhadap pimpinan organisasi dan stakeholder dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Rekapitulasi Survey Kepuasan Pengunjung

Rating	Persentase	Jumlah
1 *	0.5882352941176471%	1
2 *	0.5882352941176471%	1
3 *	1.1764705882352942%	2
4 *	7.0588235294117645%	12
5 *	90.58823529411765%	154

Indeks Kepuasan Masyarakat

4.864705882352941/5

Daftar Pemberi Rating

No	Tanggal	ID Pengunjung	Alamat Email	Rating
1	10/Jan/2023 jam 09:17	V230110013	ilhmzulfikar@gmail.com	5 *
2	9/Jan/2023 jam 09:17	V230109012	Maskur.rescue@gmail.com	5 *
3	8/Jan/2023 jam 09:14	V230108002	yanialifi.r7@gmail.com	5 *
4	6/Jan/2023 jam 11:27	V230106012	roreyalbert@gmail.com	5 *
5	4/Jan/2023 jam 23:28	V230104042	endroprasetyo279@gmail.com	5 *
6	4/Jan/2023 jam 19:33	V230104036	adibflash911@gmail.com	4 *
7	1/Jan/2023 jam 09:27	V230101001	matanpakidi@gmail.com	5 *
8	29/Dec/2022 jam 01:14	V221229001	fikrizgt@gmail.com	5 *
9	28/Dec/2022 jam 20:54	V221228032	irwantobancin17@gmail.com	5 *
10	28/Dec/2022 jam 10:40	V221228013	Oppowahyu123@gmail.com	5 *
11	27/Des/2022 jam 18:54	V221227024	SuriaSuria121@gmail.com	5 *

Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Pada Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Survei kepuasan pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bagi pengelola kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Email *

Valid email

This form is collecting emails. [Change settings](#)

Jenis Kelamin

Multiple choice

- Pria
- Wanita
- Add option or add "Other"

Required

Usia *

Short answer text

Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait pengusulan Satyalancana Karya Satya periode Februari 2022?

Sangat Puas

Puas

Tidak Puas

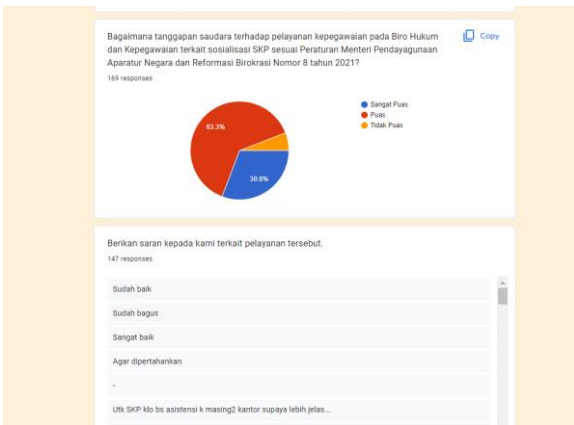
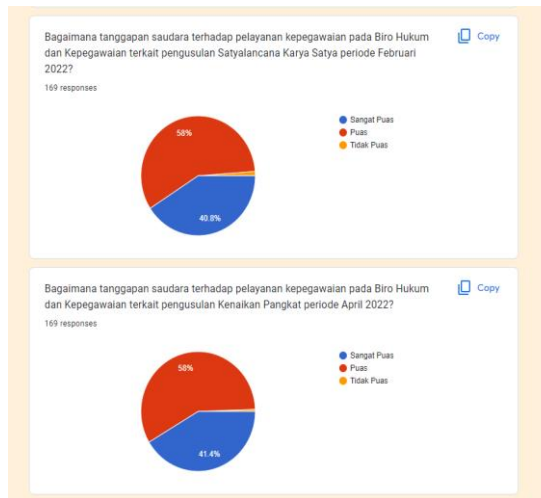
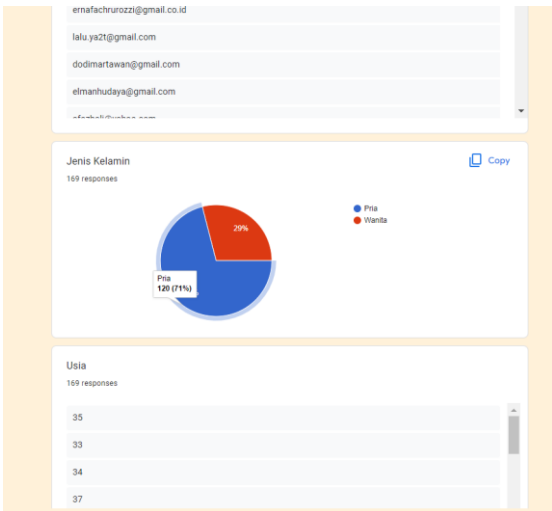
Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait pengusulan kenaikan Pangkat periode April 2022?

Sangat Puas

Puas

Tidak Puas

Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait sosialisasi SKP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021?



Survei Layanan Satyalancana Karya Satya (Responses) - Excel

Jenis Kelamin	Usia	Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait pengisian Satyalancana Karya Satya periode Februari 2022?	Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait pengisian Kenahkan Pangkat periode April 2022?	Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian terkait sosialisasi SKP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021?	Berikan saran kepada kami terkait pelayanan tersebut.	Email Address
173	Sangat Puas	36	36	26		
174	Puas	63	63	65		
175	Tidak Puas	1	1	9		
176		100	100	100		
177						
178	Kategori	I	II	III	Nilai Akhir (rata-rata)	
179	Puas	99,00%	99,00%	91,00%	96,33%	
180	Tidak Puas	1,00%	1,00%	9,00%	3,67%	
181		100%	100%	100%	100%	
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						

docs.google.com/forms/d/1drNbtw5DOUI50g7HSsEDnk3WxDrEisaghijM3_WNIU/edit#response=ACYDBNimZOr15xMHKz8_p3NLWUkkTPxRWkoV5_yin...

Survei Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Questions Responses 139 Settings

Responses cannot be edited

Survei Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Untuk itu perlu dilaksanakan survei untuk memotret keberadaan organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan guna meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

Survei ini ditujukan bagi Kepala Kantor, Kepala Seksi/Subseksi dan Kepala Subbagian/Urusan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

* Required

Nama
Wibowo

Unit Kerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu

docs.google.com/forms/d/1R6u4QO16LreX3XiEB3cP2_pFq4ReqRzHk7yTiIqz9s/edit#response=ACYDBNiYnJu83G1-ur-KR3aimrw7UpdzVpd5GppBTZJ9mG...

Survei Pengguna Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi

Questions Responses 157 Settings

Informasi terkait proses dan progress evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diperoleh dengan mudah *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

Informasi terkait waktu / jadwal / kelengkapan data dukung evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diperoleh dengan mudah *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

Fasilitator Reformasi Birokrasi dari Biro Hukum dan Kepegawaian menyampaikan informasi terkait evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan jelas dan mudah dipahami *

1 2 3 4 5



**RENCANA AKSI
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2022**

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target			
			B3	B6	B9	B12
Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	1. Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80 %	10%	20%	40 %	80 %
	2. Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	80%	80%	80%	80%	80%
Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	1. Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur	3	3	3	3	3
	2. Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	60 %	10%	20%	30%	60%
	3. Indeks layanan fasilitasi reformasi birokrasi	3	3	3	3	3
Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	1. Indeks sistem merit	0,7	0,68	0,68	0,68	0,68
	2. Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,


Noer Isrodin Muchlisin
Pembina Utama Muda (IV/c)



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2022**

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%
		Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	80%
2	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur	3
		Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	60%
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	3
3	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	Indeks system merit	0,7
		Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	80%

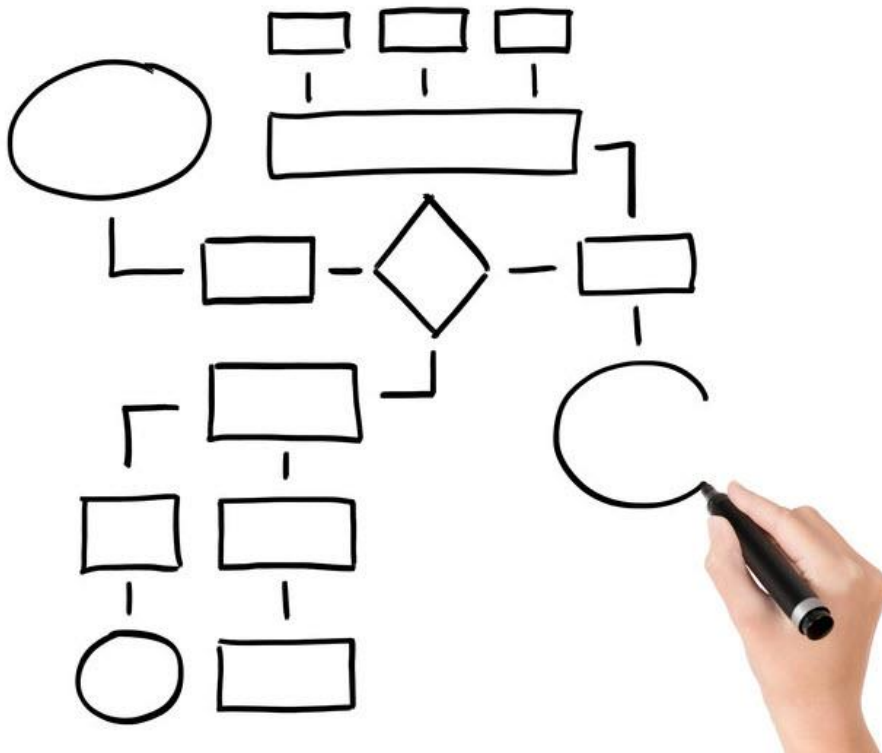
Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,

Noer Isrodin Muchlisin
Pembina Utama Muda (IV/c)



2022

SOP PENGUMPULAN DATA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, dan;
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut di atas, maka Biro Hukum dan Kepegawaian yang merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Biro Hukum dan Kepegawaian telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja sebagai pedoman atau petunjuk didalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Perencanaan.

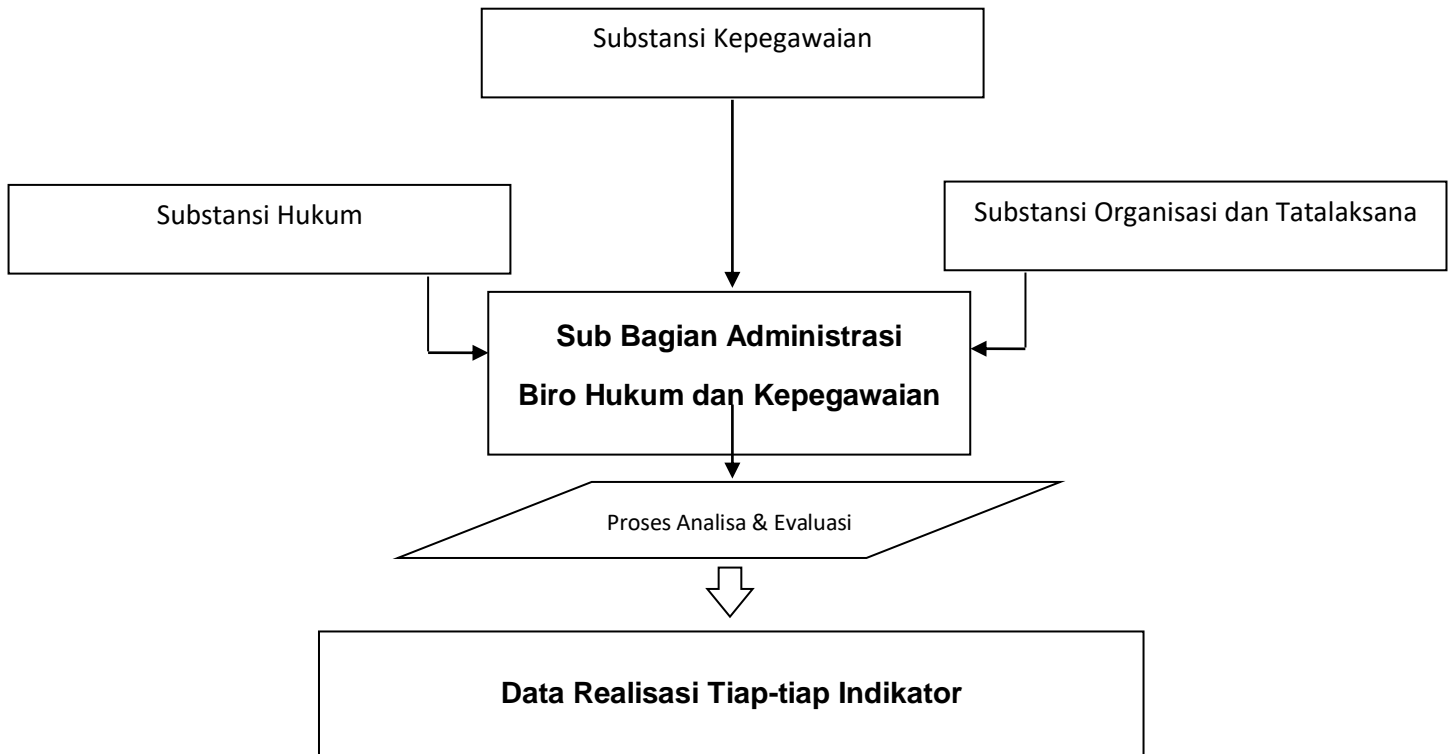
Dengan adanya SOP pengumpulan data ini diharapkan seluruh proses penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian dapat terlaksana secara optimal sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,



Noer Isrodin Muchlisin
Pembina Utama Muda (IV/c)

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN**



*Gambar : Bagan Prosedur Pengumpulan Data
Biro Hukum dan Kepegawaian*



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd., M.M.

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henri Alfiandi

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,

Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

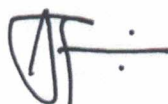
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pegawai	1.	Indeks Sistem Merit	Kategori III Indeks 0,70
		2.	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Kepegawaian	80 %
2.	Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas	3.	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80 %
		4.	Persentase Kepuasan terhadap Layanan Informasi Hukum	indeks 4
3.	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif dan Efisien	5.	Indeks Kesesuaian Organisasi yang Tepat Struktur	indeks 3
		6.	Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	50 %
		7.	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	indeks 3

Pagu Anggaran

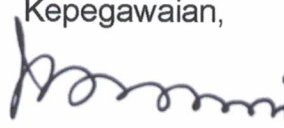
: Rp. 12.080.186.888,-

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,



Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)